



► PERUMAHAN BAGI RAKYAT

Rusun MBR Unit Dua Segera Dibangun

UMBULHARJO—Rumah Susun (Rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bakal dibangun di Kota Jogja. Kepastian tersebut menyusul dikabulkannya usulan Pemkot Jogja oleh Pemerintah Pusat.

Kepala Bidang Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja Sigit Setiawan menjelaskan jika usulan yang diajukan Pemkot Jogja sejatinya telah disampaikan sejak 2018.

"Dulu kan memang Pemkot mengusulkan dua rusun, tetapi sudah terbangun satu yang kini dijadikan selter. Tahun ini akan dibangun unit dua, lokasinya di sebelah selatannya itu. Bukan yang di bagian posko, tetapi tanah di selatannya," terang Sigit Rabu (14/1).

Sigit menuturkan garis besar rusun unit dua akan sama, yakni dengan komposisi 42 unit, musala, aula, dan ruang pengelola. "Hanya nanti bangunannya tidak hadap-hadapan, bentuknya utara-selatan. Yang sekarang itu kan timur-barat, jadi nanti jadi leter L gitu, furniturnya juga termasuk," jelasnya.

Ita menambahkan proses pembangunan sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pemkot Jogja hanya sebagai penerima manfaat setelah proses hibah. "Alokasi [anggaran] sekitar Rp24,5 miliar. Kalau [jumlah anggaran] segitu berarti sudah termasuk furniturnya, soalnya kalau [biaya] bangunannya itu sekitar Rp20 miliar," ujarnya.

Lelang untuk proyek ini telah dilakukan sejak November 2020 dalam kategori lelang dini. Lelang dilakukan segera setelah Pemkot Jogja selesai *land clearing*. "Status memang tanah kota karena itu menjadi syarat verifikasi yakni tanah tidak bermasalah," kata Sigit.

Sigit memastikan jika pembangunan tidak akan mengganggu fungsi selter, karena aksesnya sudah dibuatkan untuk selter seluas 12 meter. Namun rencananya akan ada pengaturan ulang terkait beberapa aspek di antaranya posko pendukung selter.

Dari sisi lain, Sigit menegaskan jika pengisian rusun akan dikelola melalui unit pelaksana teknis (UPT). Calon penghuni tetap rusun kelak akan diseleksi dengan dua kriteria yakni merupakan penduduk kota dan berpenghasilan rendah.

"Tower 1 yang sudah selesai dibangun sudah ada persetujuan pengelolaan sementara. Tetapi karena kondisi pandemi, maka minta izin untuk dijadikan selter dulu. Setelah itu nanti mekanisme pengisian dan proses hibah juga masih terus berjalan," katanya. (Catur Dwi Janati)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 April 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005